



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
KUPANG

Kupang, 17 - 07 - 2024

Nomor : BU.700/10 /Inspektorat/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan  
bulan April, Mei, dan Juni 2024.

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  
masing-masing (daftar terlampir)  
di -  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi penyampaian LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) baru mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN sebanyak 1024 WL dari 1060 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 36 orang, maka disampaikan bahwa :

1. Per tanggal 31 Maret 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai 95,57% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1013 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 47 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran I.
  - c. Rekapitan ASN yang telah melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran V.
  - d. Rekapitan ASN yang belum melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran VI.
2. Per tanggal 30 April 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 April 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran II.



- c. Rekapitan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran VII.
- 3. Per tanggal 31 Mei 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapori (WL) LHKPN sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapitan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 4. Per tanggal 30 Juni
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapori (WL) LHKPN sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapitan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 5. Seluruh wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara /Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;
- 6. Pimpinan Perangkat Daerah agar menyampaikan Rekapitulasi ASN yang telah melapor LHKPN Tahun 2024 kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;
- 7. Bagi Wajib Lapori LHKPN hingga tanggal 30 Juni 2024 belum melaporkan LHKPN Tahun 2024 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pembebasan dari Jabatan Struktural.



8. Untuk Informasi lebih lanjut, melalui Klinik Konsultasi Pengawasan No. HP 081238395544, narahubung Bernad Kedang (Admin LHKPN) No. HP 081337331568.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra,



**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196505161993032009

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektur Provinsi NTT.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	



**REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 30 APRIL 2024**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor 3	Sudah Lapor 4	Tepat Waktu 5	Belum Lapor 6	Terla mbat 7	Kepatu han (%) 7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	11	0	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	2	1	0	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	23	2	1	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	5	0	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	132	4	0	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	7	0	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	5	0	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	3	0	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	32	0	1	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	43	0	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	4	0	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	62	1	0	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	12	0	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	43	0	2	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	5	1	0	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	14	0	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	0	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	148	7	0	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	5	0	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	59	5	1	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	7	0	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	0	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	13	2	0	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	34	3	0	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	47	1	0	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	18	0	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	49	2	0	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	25	0	1	100,00
29.	Dinas Sosial	18	17	16	1	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	82	0	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	29	0	3	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	4	2	0	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	63	62	2	1	96,92
34.	Sekretariat DPRD	7	6	6	1	0	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	1	0	0	100,00
	Total	1060	1024	1013	36	11	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten Pemerintahan dan Kesra,  
  
**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	7
PLH SEKRETARIS	2



## LAMPIRAN I

**REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 31 MARET 2024**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	23	23	3	88,46
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	32	32	1	96,97
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	43	43	2	95,56
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	59	59	6	90,77
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	25	25	1	96,15
29.	Dinas Sosial	18	16	16	2	88,89
30.	Inspektorat Daerah	82	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	29	29	3	90,63
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	1	0	100,00
	Total	1060	1013	1013	47	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	3
PLH SEKRETARIS	1





## LAMPIRAN II

**REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 30 APRIL 2024**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Belum Lapor	Terla mbat	Kepatu han (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	11	0	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	2	1	0	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	23	2	1	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	5	0	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	132	4	0	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	7	0	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	5	0	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	3	0	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	32	0	1	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	43	0	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	4	0	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	62	1	0	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	12	0	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	43	0	2	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	5	1	0	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	14	0	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	0	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	148	7	0	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	5	0	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	59	5	1	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	7	0	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	0	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	13	2	0	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	34	3	0	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	47	1	0	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	18	0	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	49	2	0	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	25	0	1	100,00
29.	Dinas Sosial	18	17	16	1	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	82	0	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	29	0	3	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	4	2	0	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	63	62	2	1	96,92
34.	Sekretariat DPRD	7	6	6	1	0	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	1	0	0	100,00
	Total	1060	1024	1013	36	11	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten Pemerintahan dan Kesra,  
  
**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	



**REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 31 MEI 2024**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	2	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	0	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	0	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	5	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	0	100
29.	Dinas Sosial	18	17	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	0	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	0	100,00
	Total	1060	1024	36	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah



u.b.

Asisten Pemerintahan dan Kesra,

Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP-196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	



**REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 30 JUNI 2024**

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	2	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	0	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	0	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	5	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	0	100
29.	Dinas Sosial	18	17	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	0	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	0	100,00
	<b>Total</b>	<b>1060</b>	<b>1024</b>	<b>36</b>	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah



Asisten Pemerintahan dan Kesra,

**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	



**DAFTAR ASN YANG BELUM MELAKUKAN PELAPORAN LHKPN  
PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 31 MARET 2024**

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Status Pelaporan	Tepat waktu Belum Laporan
1	2	3	4	5	6
1.	Alis Yacob Obed N. Fobia	Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Belum Laporan	Belum Laporan
2.	Ama Lebu Raya Yulius	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
3.	Andry Anin	Bendahara	Badan Keuangan Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
4.	Ary Khrun Loke	Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Belum Laporan	Belum Laporan
5.	Daniel Tanody	Bendahara	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum Laporan	Belum Laporan
6.	Deny Heryanto Djunina	Kepala Seksi Penetapan Dan Penagihan	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
7.	Deselina M.W. Kaleka	Kepala Bidang	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Belum Laporan	Belum Laporan
8.	Djoese Selestino Martins Nai Buti	Kepala Bidang	Dinas Sosial	Belum Laporan	Belum Laporan
9.	Djoko Widarto	Kepala Sub Bidang Marketing Dan Customer Care	Rsud Prof. Dr. W. Z. Johannes	Belum Laporan	Belum Laporan
10.	Fiktor Erens Batmalo	Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penerimaan li	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
11.	Frans Hendrik Mone	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Belum Laporan	Belum Laporan
12.	Fransiscus Assisi Sutistyo Keban	Kepala Seksi Pengaturan Dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Belum Laporan	Belum Laporan
13.	Fransiskus Xaverius Nong	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Padu Wau Maumere	Dinas Sosial	Belum Laporan	Belum Laporan
14.	Gomer Yafet Andri Lapudo'oh	Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
15.	Gratia Florida Mae	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang Dan Penerimaan Pembiayaan	Badan Keuangan Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
16.	Hendrina Lero Kaka	Kepala Unit	Dinas Peternakan	Belum Laporan	Belum Laporan
17.	Ikram A. Karim	Bendahara	Sekretariat Dprd	Belum Laporan	Belum Laporan
18.	Isha Muhamad Jabi	Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem Dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Belum Laporan	Belum Laporan
19.	Iwan Martino Peliokila	Kepala Bidang	Dinas Kesehatan	Belum Laporan	Belum Laporan
20.	Jermias Vospimo Djeki	Kepala Seksi Verifikasi	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
21.	Josua Alexander Mboeik	Bendahara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Belum Laporan	Belum Laporan
22.	Maria Magdalena Djenmakani	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Belum Laporan	Belum Laporan
23.	Maria Media Beatrix	Kepala Bidang	Rsud Prof. Dr. W. Z. Johannes	Belum Laporan	Belum Laporan
24.	Maria Theresia Roseni Mbindy	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat	Rsud Prof. Dr. W. Z. Johannes	Belum Laporan	Belum Laporan
25.	Maria Y. Rindang Tedaang Niron	Bendahara	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum Laporan	Belum Laporan
26.	Matheus Dakosta	Kepala Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Belum Laporan	Belum Laporan
27.	Melky Edyson Ilu	Bendahara	Sekretariat Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
28.	Merry Enika Florida Thome	Kepala Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Belum Laporan	Belum Laporan
29.	Methidus Yoseph Lango Raring	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Kesehatan	Belum Laporan	Belum Laporan
30.	Rahman Hamapu	Bendahara	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum Laporan	Belum Laporan
31.	Ruben Royanes Boelan	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Belum Laporan	Belum Laporan
32.	Ruth Ferdinka Kay Kaseh	Bendahara	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Belum Laporan	Belum Laporan
33.	Soleman Meni Fransius Tualaka	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Belum Laporan	Belum Laporan
34.	Theresia Herodia	Bendahara	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum Laporan	Belum Laporan
35.	Yane Kornelia Liu	Bendahara	Badan Keuangan Daerah	Belum Laporan	Belum Laporan
36.	Yohanes Eudes Siga Mango	Bendahara	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Belum Laporan	Belum Laporan
37.	Yopi Albert Romander Seubelan	Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Belum Laporan	Belum Laporan
38.	Yopy Thon	Bendahara	Dinas Perhubungan	Belum Laporan	Belum Laporan